

PENERBITAN BUKU KEPOLISIAN TELAH TERBENTUK DI SESPIM POLRI

oleh

Letkol Pol DJUNAIDI MASKAT H

Dengan kemajuan pembangunan di segala sektor, maka berkembang pula kriminalitas yang ada di negara tersebut. Baik kuantitas maupun kualitasnya. Termasuk di negara kita dengan perkembangan pembangunan yang demikian pesat, berkembang pula bentuk-bentuk kejahatannya. Apalagi dengan perkembangan dunia yang semakin mengarah ke globalisasi, yang masalah batas negara semakin longgar, transportasi dan perkembangan antar negara sudah sedemikian lancar maka kejahatan akan mengikutinya. Kejahatan yang berskala Internasional akan terjadi di setiap negara, dan terus berkembang.

Melihat perkembangan kejahatan tersebut, diperlukan upaya penanggulangan yang sangat erat kaitannya dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan itu sendiri. Maka kita dituntut untuk mempelajari Ilmu Pengetahuan yang sangat erat dengan kemajuan kejahatan tersebut.

Bila kita mempelajari dari Ilmu Pengetahuan yang berkaitan lang-

sung, maka akan sulit untuk kita aplikasikan. Misalnya tiap anggota harus mempelajari Ilmu Ekonomi baru mengaplikasikan bentuk kejahatannya, mempelajari Ilmu Komunikasi kemudian mengaplikasikan bentuk kejahatan yang berkaitan dengan komunikasi, mempelajari Ilmu Politik kemudian mengaplikasikan bentuk kejahatan politik dan sebagainya. Maka hal tersebut tidak akan memperoleh kedalaman dan aplikasinya. Sehingga akan mengalami pendangkalan di bidang tugas kita.

Tetapi bila seseorang mempelajari salah satu Ilmu Pengetahuan kemudian dikembangkan bentuk-bentuk kejahatan yang akan timbul, serta pola penanggulangannya, dengan catatan ditulis kemudian diterbitkan dalam bentuk buku, maka hal ini akan berkembang makin dalam. Karena buku yang telah ditulisnya akan dipelajari oleh orang lain, kemudian orang lain mengembangkan dan mendalami terus. Sehingga akan mengarah ke kedalaman dan keluasan materi. Alangkah indahnya bila banyak Perwira Polri yang mau menulis hal-hal tersebut. Kepolisian kita akan terus berkembang.

Bila kita renungkan, benar-benar mengembangkan penulis-penulis buku yang bernafaskan Kepolisian merupakan kebutuhan Polri yang mendesak dan perlu dikembangkan.

TELAH TERBENTUK DI SESPIM POLRI.

Kita perlu mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Lembaga Penerbitan

Buku Kepolisian telah dibentuk di Sespim Polri dengan nama : PENERBITAN BUKU SANYATA SUMANASA WIRA dengan Surat Keputusan Ka Sespim Polri No. Pol.: SKEP/09/I/1991, tanggal 24 Januari 1991

Dalam Keputusan Ka Sespim tersebut, akan diperoleh manfaat yang sangat besar bagi perkembangan Polri yang kita cintai. Ke dalam jelas akan memperdalam dan memperluas pola penanggulangan kejahatan, serta manajemen Kepolisian itu sendiri. Sedangkan ke luar Kepolisian akan semakin dikenal oleh masyarakat luas, melalui tulisan-tulisannya. Sehingga akan mempunyai sifat yang lebih permanen serta terdokumentasikan secara baik. Di samping itu akan mendorong berkembangnya Ilmu Kepolisian kita.

TUNTUTAN TUGAS.

Seperti yang telah disinggung di depan tadi, Ilmu Pengetahuan terus berkembang. Hal ini akan diikuti pula berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Berarti Polri harus terus memperbaiki dirinya untuk menanggulangi. Baik untuk kemampuannya, maupun manajemennya.

Begitu juga perubahan sosial budaya akan mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tersebut. Dengan perubahan sosial budaya tersebut akan merubah nilai-nilai budaya. Konflik sosial akan lebih mendorong timbulnya kejahatan-kejahatan yang lebih sering.

Ditambah dengan perkembangan ekonomi yang pesat, namun pendapatan yang tidak merata, dan faktor-faktor lain bila dikorelasikan dengan masalah tersebut di atas, maka perkembangan kriminalitas benar-benar cepat.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, kita harus berupaya memperbaiki diri, baik penguasaan ilmu pengetahuan dan pola penanggulangannya. Untuk itulah kita harus banyak membaca referensi-referensi yang mudah pengaplikasiannya. Untuk itulah karya tulis dari kita sendiri yang berupaya mengaplikasikan ilmu pengetahuan, sesuai dengan penalaran penulis, sehingga akan mengantarkan pembaca lebih mudah melaksanakan tugas di lapangan. Jadi menurut penulis, penulisan karya-karya yang aplikatif dari Perwira Polri merupakan tuntutan tugas yang mutlak, dan harus didukung adanya lembaga Penerbitan Buku yang bernafaskan Kepolisian.

TUJUAN PENERBITAN BUKU YANG BERNAFASKAN KEPOLISIAN.

Lembaga Penerbitan buku yang bernafaskan Kepolisian di Sespim Polri, mempunyai tujuan mendukung pelaksanaan tugas kita, antara lain :

1. Mengeksplor kemampuan para Perwira yang potensial menulis. Dari lembaga tersebut akan memberikan dorongan kepada para Per-

wira yang mempunyai kemampuan menulis karya-karya yang dapat bermanfaat bagi perkembangan Kepolisian kita. Diharapkan akan semakin banyak para penulis di lingkungan Polrim karena karya tulisnya akan diharagai dalam bentuk Royalty sebesar 20% atau lebih dari harga buku yang diterbitkan secara keseluruhan.

2. Mengembangkan Referensi-Referensi. Dengan makin banyaknya penulis buku yang bernafaskan Kepolisian, maka akan bertambah referensi-referensi yang dapat membantu tugas di lapangan. Bila makin berkembang dan bertambah banyaknya referensi-referensi tersebut, maka akan mempunyai dampak positif lainnya, antara lain :
 - a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan yang telah ada.
 - b. Penguatan teori-teori yang telah ada sebelumnya.
 - c. Mungkin akan muncul teori-teori baru yang berkaitan dengan Ilmu Kepolisian.
3. Perkembangan kejahatan dapat diikuti dan ditanggulangi dengan baik oleh Polri. Dengan banyaknya karya-karya ilmiah yang aplikatif, maka akan memudahkan penyusunan pola-pola penanggulangan kejahatan yang semakin canggih. Karena kita

akan lebih mudah meniru apa yang telah diperbuat oleh seseorang yang berhasil (yang dibukukan), kemudian tinggal mengembangkannya. Daripada mencari mulai dari awal.

HARAPAN DUKUNGAN DARI KITA SENDIRI

Usaha lembaga penerbitan buku Kepolisian seperti tersebut di atas, tidak akan terlaksana bila tanpa bantuan dari kita, khususnya pada Kepala Kesatuan atau individu-individu kita semua. Maka bantuan dan dukungan dari semua pihak sangat menentukan perkembangan Lembaga Penerbitan buku yang bernafaskan Kepolisian tersebut.

1. Dukungan pertama dari para Perwira untuk mengirimkan karya-karyanya untuk diterbitkan. Karya-karyanya yang dapat mendukung tugas di lapangan.
2. Dukungan dari para Kepala Kesatuan, Kepala Direktorat, atau Kepala Bagian untuk menganjurkan anak buahnya untuk membeli buku yang telah diterbitkan, serta mengizinkan memasarkan ke masyarakat.

Semoga Lembaga Penerbitan Buku Sanyata Sumanasa Wira dapat tumbuh dan berkembang, dan dapat berbakti kepada Nusa dan Bangsa, khususnya Polri kita yang sangat kita cintai.

ADA GEJALA TUNA RASA

Pada waktu penulis dan beberapa Staf Sespim Polri mengadakan penelitian managerial di lingkungan Polri, penulis menemukan istilah baru yang menarik perhatian khususnya berkaitan dengan managerial di Polri saat ini. Hal yang menarik perhatian timbul ketika salah seorang Responden berpendapat bahwa sementara pejabat di lingkungan Polri sudah ada yang kena Penyakit Tuna Rasa. Yaitu beberapa pejabat tersebut yang kurang ikut merasakan kesulitan khususnya ekonomi Staf lain yang pas-pasan atau dapat dikatakan kekurangan.

Sementara pejabat tertentu berlimpah ruah. Menurut responden seolah-olah orang lain tidak tahu bahwa mereka sedang dalam berlimpah pendapatan.

Pada waktu itu memang mendistribusikannya dengan santai, malah menunjukkan contoh-contoh yang konkrit. Dari Tuna Rasa tersebut mempunyai dampak yang kurang menguntungkan terhadap perkembangan Organisasi. Malah dapat dikatakan menjurus kepada Organisasi yang kurang sehat, dan mengarah inefisiensi. Untuk itulah perlu kita bahas dan kita cari jalan keluarnya, sehingga Organisasi atau

Polri dapat kita bawa ke Organisasi yang sehat.

MENGENAL TUNA RASA

Tuna Rasa adalah sudah kurang atau hilangnya perasaan terhadap ke-adaan lingkungan sekitarnya, khususnya lingkungan dalam Organisasi Polri. Mereka yang dihindangi penyakit ini biasanya kena pengaruh Aji Mumpung, dan terlalu mendewakan materi dan wewenang yang ada padanya.

Istilah Tuna Rasa sebetulnya lahir dari mereka yang sedang menjabat pada jabatan yang Kurang memberi julukan kepada pejabat lain yang berada di jabatan Basah, yang nota bene bahwa dia seolah-olah tidak punya apa-apa, dan tidak mau tahu kesulitan yang sedang dialami oleh pejabat di tempat yang Kurang.

Mereka tidak mau Menyiprati dari hasil Pendapatannya. Pernah ada seorang pejabat menyampaikan Pendapatan anak buahnya dengan slide, di suatu rapat walaupun waktu itu ada interest tertentu. Tetapi bila disimak, menunjukkan bahwa sesungguhnya orang lain itu tahu

berapa pendapatan pejabat tertentu tiap bulannya.

Bila dikupas dan dikaji secara mendalam, Tuna Rasa ini sungguh menarik. Karena sesungguhnya Tuna Rasa itu tidak hanya dipandang materi, tetapi juga soal-soal yang lain yang ada kaitannya dengan manajerial juga. Tuna Rasa tersebut antara lain :

1. Kurang mau tahu bahwa pejabat lain (Jabatan Kering) mengalami kesulitan dalam menata kesatuannya, termasuk membina anggotanya.
2. Kurang mau tahu bahwa kesatuan lain itu merupakan bagian dari Polri, yang harus berkembang baik pula.
3. Kurang mau tahu bahwa kesatuan lain itu juga ada kaitannya dengan tugasnya, baik langsung maupun tidak langsung, dsb.
Kalau boleh meminjam istilah Noachalis Majid, mereka dapat dikatakan kurang adanya keperluan.

SEBAB-SEBAB TIMBULNYA TUNA RASA.

Tuna Rasa khususnya yang tersebut nomor 1 di atas, bila kita perhatikan, sangat dipengaruhi oleh lingkungan itu sendiri.

Sekarang kita perhatikan lingkungan kita yang sedang berkembang.

1. *Pengaruh dari atasan.* Bila atasan mempunyai Penyakit Tuna Rasa, maka jelas akan banyak anak buahnya yang akan ketularan Tuna

Rasa. Katakanlah Kapolwil A sedang dihinggapi Penyakit Tuna Rasa, maka Kapolwil tersebut akan menuntut Setoran yang cukup banyak. Dia tidak pernah mengingatkan atau memerintahkan untuk memikirkan Staf lain yang mengalami kesulitan. Yang lebih ringan lagi, bila Kapolwil tersebut tidak Setoran tetapi dia tidak mau mengingatkan atau memerintahkan untuk memikirkan Staf lain yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini Tuna Rasa yang menghinggapi Staf atau bawahannya tidak terlalu berat.

Tetapi bila Kapolwil A tersebut tidak Tuna Rasa, mengerti kesulitan Staf bagian-bagiannya, orang perorang, maka di dalam benaknya terus akan timbul bagaimana caranya untuk menghimpun dana dan menyalurkannya dengan baik. Maka akan terhindar kesatuan yang dipimpinnya dari Penyakit Tuna Rasa.

Pernah ada seorang Kolonel AD dari Sesko ABRI menyampaikan pendapatnya. Kalau beliau Polri sungguh rugi, kurang bisa memanfaatkan dana. Dana terpusatkan pada pejabat tertentu yang kurang dimanfaatkan, menurut beliau banyak keperluan pribadi. Beliau menyadarkan seandainya pejabat, katakanlah Kapolda menyisihkan pendapatannya 25% saja untuk antara lain :

- Memberikan dukungan bagi pemikir-pemikir, untuk menyalurkan konsep yang bermutu. Kalau beliau di Polri banyak perwira yang potensial.

- Memberikan dukungan motifasi bagi Perwira yang berhasil, dsb. Maka Polri akan cepat majunya.

Pendapat serupa juga pernah disampaikan oleh Brigjen Pol. Drs. Indarmawan (mantan Ses Sespim Polri). Pendapatnya adalah prinsip Les Pat Ring (sing teles nyiprati sing garing) atau yang menjabat di tempat yang basah memberi pejabat di tempat yang kering.

2. *Pengaruh dari nilai-nilai yang sedang bergeser.* Menurut penulis, nilai-nilai sedang bergeser. Nilai-nilai rasa malu bergeser ke arah rasa kurang malu. Nilai-nilai ini sedang melanda kita. Banyak cara penampilannya dengan perhiasan yang menyolok, kurang mau tahu bahwa perhiasan tersebut didapat dari yang kurang wajar.

Nilai-nilai ini memang sudah menjadi umum, dan melanda semua pejabat tidak hanya di lingkungan Polri.

Pernah ada orang asing menanyakan kegagalan dan keanehannya yaitu gajinya hanya sekitar Rp. 500.000,-, tetapi rumah, mobil dan pemilikannya luar biasa. Katanya kalau di tempatnya hal semacam itu harus diperiksa. Memang waktu itu dijawab oleh seorang teman bahwa kekayaan-

nya itu, karena pejabat tersebut mempunyai usaha lain.

3. *Pengaruh dari lingkungan pergaulan.* Banyak pejabat yang memang diserbu oleh orang-orang yang ingin berkenalan, karena ada kepentingan dalam usahanya. Orang-orang ini yang berusaha untuk menawarkan barang-barang yang cukup mewah. Dan orang tersebut bermewah-mewah. Kadang-kadang orang semacam ini sangat berbahaya. Karena bisa membujuk pejabat untuk berusaha mendapatkan uang. Kalau pejabat sudah kena bujuknya, maka jelas pejabat tersebut akan dihindangi Tuna Rasa.

Pejabat tersebut akan tidak segan-segan melaksanakan apa saja yang dikehendaki orang tadi.

AKIBAT TUNA RASA

Akibat adanya Penyakit Tuna Rasa, sepiantas kilas memang tidak terlihat akibat yang ditimbulkannya. Tetapi bila kita analisa lebih mendalam, akan mempunyai akibat yang luar biasa. Akibat-akibat tersebut antara lain :

1. *Akan timbul kecemburuan sosial di kalangan anggota.* Hal ini akan melemahkan kekompakan kesatuan. Banyak tenaga atau anggota yang kurang antusias melaksanakan pekerjaannya. Hal ini akan

menjurus tidak efisiennya penggunaan tenaga.

2. *Akan timbul konflik irrasional.* Konflik yang mengarah kepada perpecahan, konflik antara Kepala dan Wakil, konflik antara satu Direktorat dengan Direktorat yang lain, konflik antar Staf, dll. Hal ini akan berakibat lemahnya organisasi/kesatuan. Sudah ba-rang tentu tugas yang dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
3. *Akan timbul stress pada orang-orang tertentu.* Karena Staf yang stress tersebut mengerti dengan jelas adanya ketidak beresan, kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa, timbul kejengkelan, karena berkelanjutan, maka dia stress.
4. *Akan berkembang budaya Approach.* Disini akan berkembang untuk mendapatkan jabatan basah dengan jalan Approach, tidak dengan berprestasi. Berprestasi jadinya hambar, sudah barang tentu Organisasi yang akan rugi.

Jadi benar-benar sangat besar pengaruhnya khususnya pengaruh yang negatif dari adanya Tuna Rasa tersebut.

PENANGGULANGAN TUNA RASA

Untuk menanggulangi berkembangnya tuna rasa, perlu dikembangkan Rasa yang sensitif dari para pejabat. Sensitif terhadap apa yang dirasakan oleh atasan, teman

sejawat, maupun anak buah. Upaya tersebut antara lain :

1. Mengembangkan rasa bahwa banyaknya pejabat lain yang akan membutuhkan bantuannya. Bagaimana caranya? Ini yang harus terus dikembangkan oleh setiap pejabat.
2. Menimbulkan kesadaran Les Pat Ring. Selalu berupaya bagaimana caranya untuk Les Pat Ring, berapa besarnya, melalui apa ? dsb. Ada yang berpendapat, tiap kesatuan dihimpun oleh salah seorang pejabat yang ditunjuk (misalnya Kabag Bintal). Kemudian hasil Les Pat Ring tersebut dibagi oleh Kepala Kesatuannya terhadap pejabat yang perlu didukung.
3. Adanya anjuran dari atasan untuk mengadakan penyisihan dana yang didapat untuk digunakan sebagai dana untuk para pemikir untuk mengembangkan Organisasi (Organization Development). Sehingga mereka yang ditugaskan untuk mencari pemecahan masalah-masalah yang ada selalu penuh dengan antusias dan mengerahkan segala kemampuannya.

PENUTUP

Demikianlah ulasan pendapat yang muncul di lapangan khususnya Tuna Rasa yang sedang menggejala di sementara pejabat. Semoga tulisan ini ada manfaatnya.

PANDANGAN SOSIOLOGIK TENTANG SISTEM KEAMANAN

Oleh dr. Koento, MPH, MA.

Tulisan yang disajikan di bawah ini adalah merupakan Makalah penbandingan dengan judul "Pandangan Sosiologik tentang Sistem Keamanan" disajikan oleh dr. Koento, MPH, MA. pada Seminar Pengenalan Faktor Stimulan Sebagai Penyebab Timbulnya Gangguan Kamtibmas Dan Upaya Penanggulangannya yang diadakan oleh Kepolisian daerah Jawa Timur pada tanggal 15 dan 16 Oktober 1990 di Surabaya dengan isi Makalah sebagai berikut :

PENDAHULUAN :

Makalah ini lebih banyak berisi hal-hal yang sudah Saudara ketahui dari pandangan sosiologi tentang kejahatan dan penanggulangannya.

Maksud saya adalah mengingatkan saudara kembali pada hal-hal/faktor-faktor yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan I.P.K.

Yang tidak dibahas di sini adalah hal-hal yang menyangkut aparat keamanan itu sendiri, oleh karena pengetahuan saya tentang persoalan itu kurang.

PEMBAHASAN :

1. Hal yang jelas akan dipersoalkan adalah apakah I.P.K. itu

merupakan suatu usaha yang baru ataukah usaha untuk meningkatkan kemampuan sistem lama. Jawabannya jelas akan terpulang pada saudara sekalian. Suatu sistem yang baru sama sekali biasanya lebih sulit untuk dilaksanakan.

Kalau sistem lama yang ingin ditingkatkan, maka segera saja kita akan berhadapan dengan kenyataan bahwa sistem lama, dimana masyarakatlah yang bertanggung jawab atas keamanan lingkungannya sendiri tidak akan memadai untuk menanggulangi kejahatan masa kini. Kemampuan terbatas dulu pun demikian, apalagi untuk waktu ini. Corporate crime hampir seluruhnya terletak di luar kemampuannya.

Yang dikehendaki rupanya adalah partisipasi masyarakat yang ingin diorganisasi dan dilembagakan untuk menunjang pekerjaan aparat keamanan.

Kita lalu ingat bahwa sistem keamanan dulu (ronda) berakar pada otonomi masyarakat desa yang berpola Gemeinschaft.

Di kota pola ini sering sukar untuk dipertahankan R.T., dan R.W. yang menggunakan pola desa dulu sering dirasa sebagai satu anachron-

isme, demikian pula sistem keamanannya. Orang kota lebih suka mengupah orang untuk menjaga keamanan rumahnya, memang lebih efisien begitu.

Di desa dulu ronda tidak hanya satu kewajiban, tetapi juga satu pengakuan bahwa orang warga desa.

Heterogenitas, differensiasi, mobilitas, dipersonifikasi dan masifikasi merupakan ciri masyarakat perkotaan yang sulit menumbuhkan integritas dan partisipasi penduduk.

Ini tidak berarti bahwa saya tidak setuju dengan I.P.K. yang begitu melibatkan masyarakat, menuntut partisipasinya, saya hanya mengatakan bahwa partisipasi orang kota lebih sulit diharapkan, karena melawan arus perkembangan.

Kaum radikal malahan mendambakan partisipasi masyarakat, sebab menurut mereka masyarakat modern justru menumbuhkan alienasi (keterasingan) orang biasa, karena centralisasi kekuasaan dan birokrasi yang semakin luas. Orang merasa tidak kuasa menghadapi birokrasi, penguasa tidak lagi responsif terhadap kebutuhan dan permintaan kita, aturan-aturan sudah tidak mempunyai arti lagi.

Dalam rangka ini perlu pula dipertimbangkan hal sbb, apakah usaha peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem keamanan tidak justru memperbesar alienasi itu. Betul masyarakat itu turut berpartisipasi, tetapi seperti biasanya partisipasi itu tidak penuh, mereka tidak diikutsertakan dalam perencanaan

usaha ini, sehingga mungkin saja mereka tidak sesungguhnya merasa dilibatkan hanya digerakkan (dimobilisasi), kata orang ilmu poli ik. Jadi mungkin saja alienasi malahan bertambah besar.

2. Kompleksnya permasalahan sosial, banyak faktor yang terlibat yang saling pengaruh mempengaruhi, sering menyukarkan kita untuk meramal dampak tindakan kita. Seringkali akan terjadi hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Contohnya banyak. Terlebih lagi kalau kita memperhatikan gagasan pakar sosial yang menganut emergentisme. Ilmu sosial menurut mereka kurang mampu menemukan dan meramalkan fenomena sosial yang masih akan muncul. Kejadian di Eropah Timur yang begitu cepat tak ada pakar sosial yang berhasil meramalkan sebelumnya, sekarang-pun kita sukar mengatakan apa yang akan terjadi di negara bekas tirai besi itu.

Kerumitan bertambah lagi kalau kita ingat bahwa sebenarnya ilmu yang baik bisa menjelaskan, meramal dan juga dipakai untuk pengendalian (penerapan).

Sayang sekali yang sering terjadi adalah bahwa ilmu dasar misalnya baik sekali dalam menjelaskan tetapi lemah dalam ramalan dan penerapan dan sebaliknya. Teknologi sering gampang untuk diterapkan, tetapi sering harus menunggu fisika dan kimia untuk dapat menjelaskan satu fenomena.

Sosiologi dan antropologi pandai dalam menjelaskan tetapi fungsi

lain dari ilmu, meramal dan mengendalikan sulit diharapkan dari kedua ilmu itu.

Karena itu anjuran saya adalah agar I.P.K. diterapkan saja sebagai satu pilot proyek yang dimonitor terus menerus dan diperbaiki sambil jalan.

Sebenarnya hal-hal di atas telah juga dikemukakan oleh Juergen Habermas yang menyatakan bahwa ilmu yang tak bisa diterapkan/dipraktikkan sebenarnya telah berubah menjadi satu ideologi. Jadi memang sebaiknya ilmu sosialpun diterapkan, walaupun masih banyak kekurangannya.

3. Kompleksnya banyak peristiwa sosial (tidak semuanya) juga menyebabkan terdapatnya banyak teori sosial yang menjelaskan satu fenomena. Kenakalan remaja umpamanya banyak sekali teorinya, sehingga penjelasan satu teori sering bersifat partial.

Salah satu diantaranya adalah teori konflik.

Dikatakan bahwa dalam setiap pengelompokan manusia apakah itu pasangan dua sejoli atau masyarakat umum senantiasa ada kemungkinan timbulnya konflik, diantaranya yang penting adalah konflik kepentingan dan konflik nilai.

Teori ini kemudian mempersoalkan kepentingan siapakah yang sebenarnya dilayani hukum, aparat pemerintah/keamanan. Menurut penganut teori ini undang-undang, hukum, aparat pemerintah cenderung membela kepentingan kelom-

pok elite yang berkuasa. Kalaupun secara ideal hukum itu menegakkan keadilan, tetapi dalam prakteknya si elite sering lebih diuntungkan.

Tidak hanya kaum elite yang perlu diperhatikan, tetapi adalah juga golongan tertentu yang diuntungkan, seperti tukang tadah, polisi dan juga pakar sosial.

Menurut para penganut teori fungsional, karena ada fihak-fihak yang diuntungkan itulah, maka pemberantasan kejahatan itu sulit diselesaikan secara tuntas. Memberantas wanita P sulit sebab sebenarnya kedua belah pihak yang terlibat itu saling diuntungkan, ada yang jadi korban, sebab sanak saudara wanita P itu menggantungkan diri padanya; juru parkir, tukang pijat, penjual minuman makanan, Satpam dan tidak hanya geromo yang hidupnya tergantung wanita P itu.

Teori Labelling mengundang perhatian kita pada kekuasaan kaum elite untuk mengecap perbuatan tertentu sebagai tindakan penyelewengan. Hal itu mereka lakukan tidak hanya untuk kepentingan mereka tetapi juga agar si penyeleweng itu menjadi model yang buruk bagi masyarakat, dengan adanya model buruk ini, masyarakat memahami perbuatan mana yang tidak diperbolehkan dan/atau konsensus kesepakatan tentang nilai tertentu diperkuat. Teori ini pula yang menunjukkan pada kenyataan bahwa si penyeleweng akhirnya percaya bahwa dia jahat dan bertindak sesuai dengan anggapan ini.

4. Selain itu masih ada konflik nilai. Nilai dan norma masyarakat itu banyak jumlah dan ragamnya dan sering tidak serasi antara satu dengan yang lainnya. Pada saat tertentu kita terombang-ambing diantara nilai/norma/kepercayaan yang berbeda seperti di pengadilan dimana kita sering terombang ambing antara rasa iba kita dan rasa keadilan kita.

Bentrok antara kepentingan umum dan kepentingan kelompok/pribadi sering tak sederhana seperti itu, melibatkan hak-hak azasi manusia.

Dalih kepentingan umumpun sering disalahgunakan untuk mengalahkan mereka yang tidak berdaya. Ganz berpendapat bahwa pembebasan tanah yang sering menyangkut rakyat miskin memang merupakan perwujudan dari kegunaan (fungsi) si miskin bagi pembangunan tanah orang berada jarang kena gusur. Si miskin berfungsi pula sebagai penadah barang bekas, pendukung para politisi yang tidak perlu mewujudkan janji-janji politiknya, karena rakyat miskin toch tidak berdaya dan seterusnya.

Lain persoalan yang perlu dipertimbangkan, kalau ada orang yang menyeleweng siapakah yang sebenarnya bersalah orang itu atau masyarakat yang mengasuh dan membesarkannya (Pathologi sosial), banyak pakar sosial cenderung menyalahkan struktur masyarakat yang tidak memberi kesempatan yang sama untuk setiaparganya, me-numbuhkan relative deprivation = rasa

iri pada orang yang lebih kaya dan memperbesar jurang kesenjangan.

5. Hukum memang banyak kelemahannya. Si penegak hukum sering berkurang efektivitas dan efisiensinya karena penerapan hukum yang bertele-tele. Efektivitas dan efisiensi memang sering tidak dipertimbangkan dalam hukum.

Lebih penting barangkali adalah apakah penegakkan hukum yang lebih ketat kecuali menimbulkan alienasi tidak lebih merugikan masyarakat, seperti pelanggaran dari hak azasi manusia. Bisa dibayangkan satu sistem penegakan hukum yang kurang lebih sempurna dalam pengendalian kejahatan, tetapi yang bersifat begitu menekan, opresif sehingga lebih banyak kerugian yang muncul dari sistem semacam itu (George Orwell 1984).

Perlu pula diingat bahwa hanya sebagian kecil diantara kita yang menjadi penjahat kambuhan. Kebanyakan dari tindak kejahatan hanya dilakukan satu kali saja; karena itu apakah perlu membangun sistem yang bersifat menyeluruh yang aktif dan tidak reaktif seperti sekarang.

Banyak dari remaja yang akan nantinya menjadi orang dewasa yang banyak penanganan yang keras dan terlalu ketat justru akan membawa akibat bahwa si remaja tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.

Bahaya satu sistem senantiasa adalah overkill.

Persoalan lain adalah juga siapakah yang akan mengawasi petu-

gas keamanan? Akhir-akhir ini banyak sekali dibicarakan tentang kejahatan yang dilakukan oknum penegak hukum. Tetapi masalah ini sebaiknya dibicarakan pada kesempatan lain.

Tetapi yang perlu diingat bahwa yang kita bicarakan disini adalah sistem pengendalian, dan itu bisa saja menjadi berlebihan.

Bagaimana sempurnanya satu sistem pengendalian toch tetap ada saja kelemahannya dan tidak hanya itu akibatnya bisa lebih jelek Penjara yang merupakan sistem total dengan pengendalian total toch ternyata tidak mampu melaksanakan tugasnya secara sempurna, malahan sering membawa akibat negatif.

6. Peristiwa sosial pada umumnya memang kompleks.

Unsur subyektivitas misalnya senantiasa harus diperhitungkan. Pendapat masyarakat tentang tindak penyimpangan berubah. Contoh, abortus sedikit banyak mulai diterima masyarakat demikian pula perjudian.

Tidak hanya kejahatan mana yang harus diberantas tetapi cara pemberantasannya sering dipertentangkan. Hukum mati sampai sekarangpun masih dipersoalkan.

Subyektivitas juga tampak pada arti/stigma yang diberikan masyarakat pada perilaku menyimpang tertentu. Bunuh diri pada umumnya menimbulkan rasa iba, dianggap satu tragedi, sedangkan pemerkosaan biasanya menimbulkan perasaan

marah yang besar; penanggulangan-nya jelas akan berbeda.

Dalam rangka ini peran massa media pun perlu diperhatikan. Pemberitaan terlalu dramatik dan sensasional oleh massa media sangat berpengaruh terhadap pendapat masyarakat. Crime Wave yang ditimbulkan oleh mass media sudah lama dikenal, mass media adalah yang berlebihan pemberitaannya yang menjadi sebab utama dari munculnya perasaan di kalangan masyarakat bahwa tingkat kejahatan itu memburuk. Tuntutan yang berlebihan pada aparat keamanan sebagai akibat Crime Wave tadi bukan lagi hal yang langka terjadi.

7. Kompleksitas juga terlihat pada keterkaitan masalah sosial yang satu dengan yang lain. Kejahatan banyak dipengaruhi kemiskinan dan sebaliknya. Apakah mungkin kita membatasi diri pada penanggulangan kejahatan saja, kalau kita ingin memberantasnya secara tuntas. Keterkaitan ini sering dilupakan oleh pakar sosial sekalipun.

Perubahan sosial sangat besar pengaruhnya pada perilaku menyimpang termasuk tindak kejahatan. Perubahan sering dituduh menjadi sebab munculnya disorganisasi sosial, dimana aturan permainan, nilai, norma tidak dipatuhi lagi. Jelas bahwa perubahan sosial sulit ditanggulangi secara sepotong-sepotong, apalagi kalau diingat bahwa sumber perubahan sosial itu sering berasal dari mancanegara. Dunia internasional yang semakin besar pe-

ngaruhnya. Rasanya tidak mungkin lagi kita menutup diri terhadap pengaruh luar negeri. Lihat saja Afrika selatan yang urusan dalam negerinya tidak luput dari pengaruh dunia luar.

Susah rasanya melalaikan pendapatan luar negeri, seperti dalam pelanggaran hak azasi oleh aparat pemerintah/keamanan. Kita semakin gampang disorot dan dikritik, seperti dalam hal penebangan hutan.

Masyarakat Indonesia pun di masa yang akan datang tidak lagi gampang dipermainkan dan dikelabui pihak luar termasuk penguasa. Pengendalian yang berlebihan akan makin sukar dibenarkan. Mereka akan semakin pintar.

9. Semakin terbukanya masyarakat kita terhadap dunia luar menyebabkan semakin menonjolnya pengaruh ilmu dan teknologi.

Teknologi baru jelas akan memunculkan kejahatan baru dan akan menuntut peningkatan ketrampilan aparat keamanan. Profesionalisasi akan semakin penting. Aneh juga rasanya kalau kita di sini ingin kembali ke sistem lama.

Tetapi profesionalisasi itu akan membawa akibat negatif tersendiri. Kesenjangan antara si profesional dan orang awam akan semakin sering terjadi. Salah komunikasi akan makin menjadi hal yang setiap hari terjadi. Kekuasaan akan semakin terkumpul pada tangan si profesional dan masyarakat awam akan semakin tidak suka akan hal ini.

Mengikuti kecenderungan kota, diferensiasi dan spesialisasi makin banyak petugas keamanan swasta yang muncul, hal yang tidak selalu mendapat tanggapan menyenangkan dari pihak aparat keamanan resmi yang sering melihatnya sebagai saingan Polisi perlu mengorganisasi mereka agar menjadi lebih efektif dan efisien.

Mereka tidak perlu dimusuhi; mereka juga perlu diawasi.

Sistem keamanan yang mau dibangun perlu fleksibel melihat kompleksnya permasalahan yang dihadapi.

9. Dalam menegakkan hukum ini masih juga perlu dipersoalkan apakah semua kejahatan bisa ditanggulangi dan dicegah.

Pembunuhan misalnya yang begitu sering melibatkan emosi yang besar apa benar bisa dicegah; apakah agresivitas bisa dicegah oleh satu sistem keamanan.

Apalagi kalau diingat bahwa pembunuhan sering dilakukan pada orang dari lingkungan dekat si pelaku. Agresi yang muncul sebagai akibat frustrasi mengharuskan kita menghilangkan sumber frustrasi. Apa itu mungkin?

Perlu dipersoalkan juga apakah kita hanya akan memusatkan perhatian kita pada tindak kejahatan dan tidak pada pribadi si pelaku. Apakah rehabilitasi tidak lebih penting dari pengendalian tindak kejahatan?